

Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	Mengukur efektifitas kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam membantu DPRD dan mengawal akuntabilitas OPD Provinsi dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat	Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan BPK-RI
4		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Mengukur efektifitas kinerja Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan, asistensi Laporan Keuangan dan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Mengukur efektifitas kinerja Inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui reviu terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Hasil penilaian terhadap laporan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat
6		Persentase OPD yang nilai evaluasi LAKIP adalah B ke atas	Mengukur efektifitas kinerja Inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Provinsi Jawa Barat melalui evaluasi implementasi SAKIP OPD	Hasil penilaian terhadap laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
7	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mensosialisasikan dan membina penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik	Hasil monitoring terhadap pelaksanaan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Lampiran 1b
Target dan Realisasi Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	EKSISTING 2013	2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGE T	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	2,693 poin	2,750	2,750	2,950	2,920	3,000	NA	3,150		3,250	
2	Persentase penurunan jumlah temuan penyimpangan terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	312 temuan	10%	35,90%	10%	22,30%	10%	NA	10%		10%	
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI LKPD Pemprov Jabar	32,20%	45%	61,90%	50%	76,34%	60%	74,85%	70%		70%	
4	Persentase penyelesaian TLHP OPD Provinsi	75%	80%	80,90%	85%	87,64%	90%	77,30%	95%		100%	
5	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	
6	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah \geq B	20% (11 OPD)	35%	37,50%	50%	67%	80%	80%	90%		90	
7	Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemprov Jawa Barat	CC	CC	CC	B	BB	A	A	AA		B	
8	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	0	10%	10,71%	50%	47%	75%	47%	100%		100%	
9	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)		100 (Hijau)	
10	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	60%	65%	80%	70%	75%	75%	22,7 % (75%)	75%		75%	
11	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikat	65 orang	70 orang	68 orang	70 orang	68 orang	73 orang	61 orang	80 orang		93 orang	
12	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikat penjenjangan Auditor Madya	4	10 orang	14 orang	15 orang	20 orang	20 orang	24 orang	25 orang		30 orang	
13	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	I	II	II	II	II	III	III	III		III	

Lampiran 1c
Rencana Kinerja Tahun 2016

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Eksisting 2013	Target 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	2,693	3,000 poin
		Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	312 temuan	10% (190 temuan)
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	32,2	60%
			Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi	75	90%
			Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	WTP	WTP
3	Meningkatnya mutu dan akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	≥B = 12 OPD (20%)	80%
			Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	CC	A

4	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern, transparansi, dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	0	75%
		Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	<u>100 (indikator hijau)</u>	100 % (Hijau)
			Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	60	75%
5	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	62	73 orang
			Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	4	20 orang
			Level kapabilitas Inspektorat	I	III